

ABSTRACT

This study examines how partnership relation through Japan Platform. The results of this study found that the Japanese government (MOFA) and Japanese NGOs established partnership relationships through Japan Platform in the distribution of foreign aid to developing countries. The partnership relationships between NGOs and countries through Japan Platform can be proved by granting NGO assistance, NGO capacity building support, and dialogue between NGOs and the Japanese government. Before any partnership relationship exists, there is a confrontation between MOFA and Japanese NGO. Furthermore, the process of making foreign policy in the economic field to implement the policy can not be done only by the government (state actors) but also requires the involvement of civil society actors who are part of the element of the citizens.

Keywords: Foreign Aid, ODA Charter, Human Security, Civil Society, State, Partnership

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana hubungan relasi *partnership* melalui Japan Platform. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemerintah Jepang (MOFA) dan NGO Jepang menjalin hubungan *partnership* melalui Japan Platform dalam distribusi bantuan luar negeri ke negara-negara berkembang. Relasi *partnership* antara NGO dan negara melalui Japan Platform dapat dibuktikan dengan pemberian jumlah dana bantuan untuk NGO, dukungan pembangunan kapasitas NGO, serta mengadakan dialog-dialog antara NGO dan pemerintah Jepang. Sebelum ada ikatan hubungan *partnership*, terdapat konfrontasi antara MOFA dan NGO Jepang. Akhirnya, proses pembuatan kebijakan bantuan luar negeri hingga mengimplementasikan kebijakan tersebut tidak bisa dilakukan hanya pemerintah (aktor negara) akan tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktor *civil society* yang merupakan bagian dari element warga negara.

Kata-Kata Kunci: Bantuan luar negeri, ODA Charter, *Human Security*, *civil society*, negara, *partnership*.